Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19284
Volume 8, No. 2, 2023 (1247-1253)

ANALISIS PERKEMBANGAN LKNB SYARIAH DALAM MENINGKATKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA

[1]Muhammad Fadil Zuhri, Mutiara Liza, Wildan Syahputra, Enika Diana Batubara
UIN Sumatera Utara

Abstract
This research discusses the development of the role of sharia LKNB in improving Sustainable Development Goals in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative. The result is that sharia LKNB in Indonesia has not increased because one of the sharia LKNB products, namely pension funds and insurance, has not increased the achievement of poverty alleviation and gender equality as the goals of the SDGs in Indonesia. This research is expected to be a trigger for both the government and the private sector to make sukuk as financing for SDGs-based programs. In addition, to invite the general public to be able to compress in participating in developing the State and be active in achieving the SDGs goals.
Keywoards: Sharia LKNB, Sustainable Development Goals

Abstrak
Penelitian ini membahas perkembangan peran lknb syariah dalam meningkatkan Sustainable Development Goals di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasilnya adalah lknb syariah di Indonesia masih belum meningkat dikarenakan dari salah satu produk lknb syariah yaitu dana pensiun dan asuransi masih belum meningkatkan pencapain penentasan kemiskinan dan kesataraan gender sebagaimana tujuan dari SDGs di indonesia. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi pemicu baik bagi pemerintah maupun swasta untuk menjadikan sukuk sebagai pembiayaan program berbasis SDGs. Selain itu untuk mengajak masyarakat umum untuk dapat berkesampatan dalam partisipasi membangun Negara dan aktif dalam pencapaian tujuan SDGs.

Kata Kunci: LKNB Syariah, Pembangunan Berkelanjutan

Pendahuluan

LKNB Syariah memainkan peran penting di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang biasanya tidak dapat disediakan oleh bank. LKNB Syariah, Dengan semakin beragamnya produk dan layanan yang ditawarkan, mereka bersaing di pasar keuangan untuk memenuhi permintaan nasabah. Hukum syariah juga relevan di pasar keuangan dan sektor real estat. Seperti bank, sebagian besar LKNB Islam memiliki anak perusahaan yang berbeda untuk menjalankan operasinya. Karena kepentingan dan ruang lingkup operasinya, LKNB diawasi oleh otoritas jasa keuangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kerangka kerja pengawasan berbasis risiko. Akibatnya, LKNB syariah cenderung fokus pada pemeriksaan risiko kebangkrutan, yang dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan krisis ekonomi yang dapat timbul. (Leon et al., 2020)

Adanya hubungan yang muncul di sektor keuangan, baik IKNB Konvensional maupun IKNB Syariah, berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yaitu pandangan kausalitas dua arah yang positif, yang berarti bahwa pertumbuhan IKNB Konvensional dan IKNB Syariah akan berkontribusi pada laju perkembangan ekonomi, dan sebaliknya, pembangunan ekonomi akan meningkatkan minat lembaga keuangan (IKNB Konvensional dan IKNB Syariah).(Trimulato & Mustamin 2022).

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB untuk Negara-negara di dunia sudah tentu memerlukan biaya yang tidak murah. Konsep mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali ini tidak bisa hanya mengandalkan penanganan dari pemerintah selaku pemilik kuasa, tetapi juga dibutuhkan partisipasi dari pihak-pihak lain. Seperti sektor swasta hingga perorangan. Sri Mulyani (2018) menegaskan bahwa agar implementasi SDGs ini dapat terlaksana dengan efektif dibutuhkan kemitraan yang inklusif dan pembiayaan yang inovatif.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, disingkat SDGs dalam bahasa Inggris. Tujuan ini secara resmi dinyatakan oleh negara-negara di seluruh pemerintahan sebagai ambisi pembangunan bersama hingga 2030 dalam resolusi PBB yang dirilis pada 21 Oktober 2015. Ini adalah kelanjutan atau penerus dari Tujuan Pembangunan Milenium, yang ditandatangani sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 oleh para pemimpin dari 189 negara dan belum berlaku sejak akhir 2015. (Nuringsih 2019).

Tahun 2016 merupakan tahun yang paling signifikan bagi Indonesia. Karena tahun ini, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam mewujudkan SDGs, atau Sustainable Development Goals. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 tujuan, dan 240 indikator. Salah satu tujuan SDGs adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja, dan

pekerjaan yang layak untuk semua, dan UMKM halal memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini.(Novitasari, 2019)

Meskipun demikian, hambatan yang terkait dengan implementasi SDG tidak hanya berkisar pada dua faktor ini. Dalam hal substansi, tujuan SDGs untuk sepenuhnya memberantas komponen negasi pembangunan adalah pekerjaan yang berbatasan dengan hal yang mustahil. Dari sisi prosedur, implementasi SDG tingkat nasional masih menyisakan PR seperti sistem akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non-pemerintah, dan proses keterlibatan itu sendiri. Hal ini seharusnya tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja guna mempercepat pertumbuhan nasional Indonesia hingga 2030. Keterlibatan aktif pemerintah tidak diragukan lagi merupakan modal terpenting untuk implementasi dan pencapaian SDGs di Indonesia. (Panuluh & Fitri 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai salah satu otoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ikrar ini melalui proyek-proyek pembiayaan jangka panjang. Inisiatif ini dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan keuangan kepada lembaga-lembaga yang mempraktikkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Inisiatif keuangan berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan tidak hanya pangsa pembiayaan tetapi juga ketahanan dan daya saing lembaga jasa keuangan. (Hayati & Yulianto, 2020)

Kajian Teori

LKNB Syariah

Lembaga keuangan non-bank adalah orang yang mengambil dana dari masyarakat umum dengan menawarkan saham untuk keuangan perusahaan dan kemudian meminjamkan uang kembali ke masyarakat umum. Lembaga keuangan ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, termasuk:

a. Asuransi Syariah

Asuransi, yang biasa disebut sebagai pertanggungan, adalah kontrak antara dua pihak atau lebih di mana pemegang polis mengikatkan dirinya pada pertanggungan dengan memungkinkan harga asuransi untuk mengkompensasi tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang dikeluarkan oleh Perusahaan asuransi mungkin menghadapi sebagai akibat dari keadaan yang tidak terduga, atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau jiwa tertanggung (Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat menggunakan asuransi karena menyadari lembaga keuangan non-bank ini membuat mereka merasa aman terhadap segala macam bahaya.

b. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah pendapatan yang diberikan oleh peserta segera setelah mereka keluar dari suatu institusi. Sesuai undang-undang ke-11 tahun 1992, dana anuitas adalah badan hukum yang memantau dan mengelola skema pembayaran pensiun. Organisasi ini dipisahkan menjadi dua elemen berbeda: rekening pensiun perusahaan dan dana pensiun lembaga keuangan.

c. Model Ventura Syariah

modal ventura adalah salah satu bentuk pembiayaan yang termasuk di dalamnya.

d. Pegadaian Syariah

Lembaga keuangan non bank yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan atau perkembangan ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, memperkuat landasan perusahaan ini dengan menyatakan bahwa pinjaman melalui pos gadai sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn adalah sah. (Lesmono, 2022)

e. Perusahaan Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang menyediakan keuangan atau barang modal sebagai bagian dari kegiatan pembiayaannya. Di antara lembaga keuangan adalah sebagai berikut: Perusahaan keuangan dan perusahaan modal ventura. (Werdayanti, 2008)

Sustanaible Development Goals

Sustanaible Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati, mencakup 17 tujuan utama yang harus dipenuhi. Salah satu Target yang harus dicapai pada tahun 2030 adalah kesejahteraan ekonomi. Berbagai pemangku kepentingan dilibatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga keuangan mikro syariah adalah salah satu organisasi yang relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs. Keduanya tidak memiliki tujuan yang sama: untuk memperbaiki masyarakat..

SDGs juga bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi; kehadiran organisasi keuangan mikro Islam menawarkan akses distribusi layanan keuangan yang adil bagi kelas bawah. Kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan merupakan dua SDGs yang ingin dicapai di sektor ekonomi. Bank syariah berkontribusi pada pencapaian SDGs dengan memperluas posisi mereka sebagai lembaga keuangan syariah dengan fokus masyarakat yang kuat. Bank syariah memiliki kemampuan untuk mencairkan

Terutama untuk menjangkau seluruh komunitas. Untuk mencapai SDGs, bank keuangan mikro syariah harus memberikan pembiayaan usaha kepada usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan standar ekonomi semua masyarakat. Kemudian, bagi setiap masyarakat yang ingin mengakses produk keuangan, berikan akses layanan yang baik dan berkualitas, termasuk produk investasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dari berbagai sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berarti menggambarkan suatu topik penelitian. Konsep pembiayaan syariah konsisten dengan SDGs.

Hasil dan Pembahasan

Peran keuangan sosial Islam dalam menyediakan jaring pengaman sosial di tingkat masyarakat sangat penting dalam lingkungan ekonomi dan keuangan Islam. Sektor ini berpotensi untuk digabung dengan sektor keuangan syariah lainnya dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau disinergikan dengan instrumen fiskal dalam rangka membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Hipotesis pertumbuhan yang dipimpin keuangan juga dikemukakan. Ini menandakan bahwa industri LKNB Syariah adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, LKNB syariah wajib menciptakan produk yang memenuhi setiap keinginan masyarakat, seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai lembaga intermediasi alternatif di Indonesia. (Mudrikah, 2023)

Menurut data BPS, hanya 8,52% rumah tangga lansia yang akan menerima jaminan pensiun pada tahun 2022, sementara hanya 5,28% yang akan memiliki jaminan hari tua. Penuaan populasi yang tidak didukung oleh jaminan sosial yang lebih besar akan menempatkan tekanan fiskal lebih lanjut pada sistem pendukung dewasa - baik keluarga maupun menunjukkan - dalam bentuk tagihan penyakit lama, misalnya. Berbagai langkah pengentasan kemiskinan yang sudah ada di seluruh negeri akan memiliki dampak tidak langsung dan langsung pada kemiskinan lansia. Indonesia sudah memiliki sejumlah program perlindungan sosial, termasuk program yang disebut Keluarga Harapan (PKH), Polis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sejumlah program bantuan pangan. Namun, tujuan, akurasi, dan luasnya program yang terbatas masih relatif rendah dan mungkin tumpang tindih.

Berdasarkan temuan (Laksono et al. 2022) terbukti bahwa status sosial ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan kepesertaan asuransi kesehatan pada perempuan pekerja di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah perlu lebih aktif dalam melibatkan pengusaha untuk meningkatkan kepemilikan asuransi kesehatan karyawannya dalam konteks JKN. Sasaran program ini dapat berfokus pada pekerja dengan sosial ekonomi rendah, utamanya pekerja perempuan . Hasil penelitian ini juga memperlihatkan pentingnya upaya sosialisasi produk dan manfaat asuransi kesehatan pada wilayah pedesaan, salah satunya menyasar kelompok pekerja perempuan. Perlu upaya masif untuk meningkatkan kepemilikan

jaminan kesehatan pada segmen pekerja, khususnya pekerja perempuan. Secara biologis, pekerja perempuan memiliki risiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan pekerja laki-laki, utamanya dikaitkan dengan fase hamil dan melahirkan. Jika ini di Implementasikan dengan Baik maka dapat meningkatkan kesetaraan gender sebagai mana tujuan dari SDGS.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mengambil berbagai langkah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Indonesia memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, industri dan infrastruktur, habitat laut, dan kolaborasi internasional. Untuk mencapai ketenaran komunal, pemerintah Indonesia juga melibatkan masyarakat dalam upaya mencapai SDGs. Kesungguhan Indonesia dalam mencapai SDGs tidak hanya berasal dari komitmennya kepada masyarakat internasional, tetapi juga dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam SDGs, yang konsisten dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

Kesimpulan

Tumbuhnya isu menurunnya kualitas lingkungan, isu meningkatnya kesenjangan sosial, dan isu perubahan iklim, dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi negatif dari pembangunan ekonomi memotivasi para pemerhati lingkungan, bisnis, dan pemerintah global dan nasional untuk memulai pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pembangunan berkelanjutan muncul sebagai paradigma baru untuk mencapai kemajuan ekonomi. Keseimbangan kepentingan bisnis tidak memberikan validitas untuk mengurangi perhatian dan komitmen untuk menjaga lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih sehat. Beberapa lembaga keuangan dunia telah meluncurkan program global untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah harus merangkul pihak-pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas, pelaku korporasi, dan kaum muda agar mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi sebaik mungkin. Karena tujuan utama meluncurkan pembangunan berkelanjutan adalah untuk menunjukkan bagaimana pembangunan yang makmur dapat dipertahankan untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Hayati, Neneng, Erwin Yulianto, and . Syafdinal. 2020. “Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals.” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 6(1): 1633–52.

Laksono, Agung Dwi, Wahyu Pudji Nugraheni, Nikmatur Rohmah, and Ratna Dwi Wulandari. 2022. “Health Insurance Ownership among Female Workers in Indonesia: Does Socioeconomic Status Matter?” *BMC Public Health* 22(1): 1–11. https://doi.org/10.1186/s12889-022-14189-3.

Leon, R. D., Treapăt, L. M., Gheorghiu, A., & Stan, S. O. (2020). A microcredit evaluation model for non-bank financial institutions. Kybernetes, 49(9), 2185–2199. https://doi.org/10.1108/K-05-2018-0250

Lesmono, Bambang Lesmono. 2022. “Studi Literatur Pergadaian Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1): 599.

Mudrikah, Azizah. 2023. “Pengaruh Sukuk , Reksadana Syariah Dan Total Aset LKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015-2021.” 7(April): 1074–83.

Novitasari, Maya. 2019. “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi UMKM Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals.” *Majalah Ekonomi* 24(1): 49–58.

Nuringsih, Trimulato; 2019. “KETERKAITAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DENGAN AGENDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.” 3: 159–74.

Panuluh, Sekar, and Meila Riskia Fitri. 2016. “Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia.” (September).

Trimulato, and Asyraf Mustamin. 2022. “Peran Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dalam Mendukung UMKM.” *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1(1): 50–68.

Trimulato, Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany. 2021. “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10(1): 19–38.

Werdayanti, Andaru. 2008. “Jurnal Pendidikan Ekonomi.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 2 No.2 Juli, Tahun 2008* 3(2): 79–92.